



Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

Sri Ayuningsih Doni^{1*}, Rustam Tohopi², Yacob Noho Nani³

¹⁻³Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Penulis korespondensi: sriayuningsihdoni3@gmail.com

Abstract. *This student aims to determine how BPNT contributes community in Sipatana District, Gorontalo City. Method used is qualitative findings show that the implementation of BPNT in Sipatana District, particularly in Molosipat U and Tanggikiki sub-districts, has been carried out in accordance with the statutory regulations of 2019 regarding the indicators of power distribution and actor strategies, without any personal intervention in determining beneficiary eligibility. Regarding the characteristics of the implementing institutions, coordination among agencies from the district level to RT/RW has run well and has been conducted transparently and participatively to ensure that the assistance is well-targeted. However, on the indicators of implementer compliance and responsiveness, several obstacles are still found such as delays in disbursement, a lack of direct socialization to the community, and slow responses from the sub-district office in handling complaints from beneficiary families (KPM). These conditions lead to a lack of optimal understanding among beneficiaries regarding the mechanism of aid distribution. Additionally, the impact of BPNT on improving beneficiary welfare remains consumptive in nature and has not fully encouraged economic independence among poor households. Therefore, improvements in service effectiveness, two-way communication, and periodic evaluation are required to enhance BPNT's contribution in reducing poverty rates and achieving sustainable community welfare.*

Keywords: *Community Welfare; Implementation of Assistance; Program BPNT; Recipient Family; Sipatana District*

Abstrak. Dalam penerapan penelitian ini memiliki tujuan untuk pelaksanaan Program BPNT terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian ini hasilnya program BPNT di Kecamatan Sipatana khususnya pada kelurahan Molosipat U dan Tanggikiki, pada indikator kekuasaan dan strategi aktor telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2019, tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi dalam penentuan penerima manfaat. Pada indikator karakteristik lembaga pelaksana, koordinasi antar instansi dari tingkat kecamatan hingga RT/RW telah berjalan baik serta dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, pada indikator tingkat kepatuhan dan respons pelaksana masih ditemukan kendala seperti keterlambatan pencairan bantuan, kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta lambatnya respon kelurahan dalam menangani keluhan KPM. Kondisi ini menyebabkan sebagian penerima manfaat belum memahami secara optimal mekanisme penerimaan bantuan. Selain itu, dampak BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga miskin. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelayanan, komunikasi dua arah, serta evaluasi berkala agar BPNT dapat memberikan kontribusi lebih besar secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kecamatan Sipatana; Keluarga Penerima; Kesejahteraan Masyarakat; Pelaksanaan Bantuan; Program BPNT

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya kesejahteraan, khususnya kepemilikan barang, sehingga orang-orang yang kekurangan pendapatan atau konsumsi yang diperlukan untuk melewati ambang batas dianggap miskin batas kategori kesejahteraan minimum. (Ayu Pratiwi, 2022)

Salah satu tanda belum berhasilnya pembangunan adalah masih tingginya angka kemiskinan., yang menunjukkan tingkat perkembangan suatu masyarakat. Kemiskinan selalu menjadi masalah bagi masyarakat dan negara di seluruh dunia. Kemiskinan telah diatasi dengan berbagai cara. Mengurangi kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan jumlah Langkah strategis penanganan kemiskinan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti BPNT.

Permasalahan kesejahteraan menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah. Kesejahteraan bukanlah masalah baru di Indonesia itu selalu menjadi subjek yang menarik untuk dibahas. Salah satu tujuan aktualisasi adalah partisipasi Indonesia dalam diskusi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa "menjaga segenap bangsa Indonesia sekaligus menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan negeri" adalah tugas Negara. Tujuan ini kemudian ditanamkan dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", dan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (Yani Ristanti & Fadhli, 2022)

Pada kecamatan sipatana menunjukan bahwa terjadinya penurunan BPNT di Kelurahan Molosipat U dan di Kelurahan Tanggikiki. Peneliti tertarik untuk meneliti di Kelurahan Molosipat U dan Tanggikiki Kota Gorontalo dengan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle.

Adapun hasil pengamatan yang peneliti dapatkan adanya problem terkait BPNT seperti kurangnya bentuk penyuluhan/sosialisasi dan komunikasi terkait respon penerimaan bantuan pada masyarakat, sehingga terjadinya kesenjangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan hal ini peneliti tertarik perihal tentang program BPNT di Kecamatan Sipatana.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi dibahasakan sebagai administrator yang masing-masing berarti memiliki artian dalam memenuhi. Namun, menurut keban (Sawir, 2021) hal ini menggambarkan administrasi sebagai bentuk arahan dari pemerintahan dalam pengambilan kebijakan untuk perihal hal-hal tertentu, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, dan sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, serta sebagai tempat untuk bidang akademik dan teoritik.

Nicholas dalam (Pasolong, 2019) menyampaikan bahwa kombinasi antar teori dan praktik berhubungan erat dengan proses administrasi agar pemerintah lebih responsive pada

pelayanan publik pada masyarakat. Dalam prakteknya administrasi publik bersifat transparansi dan berusaha memberikan keefektifan serta efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara kondusif.

Dimensi Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki 6 (enam) cakupan dimensi strategi yang memiliki tujuan tertentu dalam ketercapaiannya (Pramesti, 2021). Bahkan setiap elemen dalam dimensi tersebut harus saling berketerkaitan diantaranya Dimensi Kebijakan, Organisasi, Manajemen, Moral dan Etika, Lingkungan, Akuntabilitas Kinerja.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan sebagai hal yang bersifat politis yang mengidentifikasikan antara prinsip dan ide maupun gagasan. Keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan puncak yang dipikirkan secara matang dan hati-hati bukanlah kegiatan rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan keputusan.

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-Tahap kebijakan Publik William dalam (Meutia, 2017) ialah: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan hal yang bersifat konteks dalam intervensi tertentu dalam pengambilan suatu kebijakan. Hal ini sering dilakukan agar dapat di implementasikan dalam sebuah kebijakan.

Menurut (Pramono, 2020) Implementasi merupakan dukungan yang moril dalam sebuah kebijakan, tanpa adanya implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara kompleks.

Model Implementasi Kebijakan

Model Merilee S. Grindle

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian peneliti memikirkan dalam pengambilan teori yang relevan yang akan digunakan, dengan ini peneliti memilih teori Merilee S. Grindle. Dalam teori ini berpusat dalam dua hal penting yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang relevan dengan kondisi tertentu.

Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa variable yang mempengaruhi keberhasilannya (dalam Tahir, 2019) sebagai berikut :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap para pelaksana
- f. Lingkungan politik, ekonomi, dan sosial

Model Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Kerangka analisis adalah teori dikembangkan oleh Daniel. Mazmanian dan Sabatier memprediksi hal-hal penyebab permasalahan dalam pelaksanaan dalam esainya. Seperangkat kondisi ideal diperlukan untuk implementasi yang ideal. (Tahir, 2019)

Pelaksanaan implementasi kebijakan menurut sentralistis dapat terlaksana dalam pengambilan keputusan berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Memiliki tujuan yang konstan
- b. Dalam perubahan memiliki teori yang kausal
- c. Secara legal memiliki struktur yang jelas
- d. Keahlian dan komitmen sebagai ahli sangat penting
- e. Kepentingan kelompok memiliki dukungan tertentu
- f. Penguasa atau kelompok tertentu memiliki kondisi sosial serta ekonomi yang memadai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Distribusi bantuan pangan oleh pemerintah direstrukturisasi dalam bentuk digital untuk memastikan alokasi sumber daya pangan secara efisien kepada unit keluarga penerima. Pendekatan ini melampaui mekanisme monokomoditas sebelumnya, memberikan fleksibilitas untuk memilih berbagai komoditas pokok melalui e-warong yang terhubung dengan sistem perbankan. Implementasi skema ini diarahkan pada pengurangan beban finansial keluarga sekaligus optimalisasi gizi, dengan ketentuan presisi dalam sasaran, temporalitas, mutu, administrasi, dan kuantitas, sehingga tercapai hasil yang maksimal secara sosial dan ekonomi. (Septiriana, 2022)

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan publik, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, dirumuskan sebagai kondisi optimal di mana warga negara memperoleh pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara simultan untuk kehidupan yang layak dan pengembangan diri yang berkelanjutan.

Mariato dalam (Linawati, 2023) Kegiatan yang diorganisir oleh lembaga pemerintah dan swasta dikenal sebagai kesejahteraan masyarakat. Aktivitas tersebut difokuskan pada mitigasi hambatan sosial, fasilitasi penyelesaian problematika komunitas, dan penguatan kapasitas hidup serta kesejahteraan individu maupun kolektif.

3. METODE PENELITIAN

Temuan ini memanfaatkan pendekatan kualitatif sebagai metodologinya. Tujuan penelitian kualitatif ialah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik ilmiah, bahasa deskriptif, dan lingkungan alam tertentu. (Kusumastuti & Mustamil Khoiron, 2019)

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki untuk melihat bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan yaitu dokumentasi untuk mendokumentasikan perihal yang terjadi dilapangan, observasi atau pengamatan sebagai data pendukung penting ketika pelaksanaan penelitian berlangsung dan terakhir wawancara sebagai unsur penting dalam sebuah penelitian kualitatif yang relevan dengan hal-hal yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentang Implementasi BPNT memiliki hasil penelitian dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Isi Kebijakan

Kepentingan yang mempengaruhi

Dalam indikator program BPNT ini khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan telah berjalan secara efektif, objektif, dan transparan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, tidak ditemukan adanya indikasi kepentingan pribadi atau intervensi pihak tertentu dalam proses penentuan penerima manfaat.

Tipe Manfaat atau Jenis Manfaat

Indikator tipe atau jenis manfaat dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki menunjukkan hasil yang efektif dan memberikan dampak positif bagi orang dinilai telah memnuhi kebutuhannya melalui bantuan dana yang diterima secara berkala.

Derajat perubahan yang ingin dicapai

Indikator dalam pelaksanaan Bantuan BPNT ini khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki, menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan. Senada

menurut (Hintalo et al., 2024) bahwasanya dalam pemerintahan perlu adanya transparansi dengan semua pihak terutama masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Meskipun program BPNT telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar, namun dari segi peningkatan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh, dampaknya masih tergolong rendah.

Letak Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam penentuan penerima BPNT di Kecamatan Sipatana khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki sudah dilaksanakan secara kolektif, terarah, dan berdasarkan asas keadilan serta keterbukaan. Proses musyawarah menjadi wadah penting dalam menghindari kesalahan sasaran penerima, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program BPNT di wilayah tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Senada dengan pendapat (Juriko Abdussamad, 2021) bahwasanya dalam pengambilan kebijakan pemerintah harus dapat mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas jelas pada setiap pengambilan keputusan.

Pelaksana Program

Pelaksana program BPNT di Kecamatan Sipatana khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki telah menjalankan perannya dengan cukup baik, terutama dalam memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyampaian informasi yang lebih cepat dan merata kepada masyarakat penerima.

Sumber-sumber yang digunakan

Indikator sumber-sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sipatana khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan, serta sumber daya teknis dan fasilitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.

Lingkungan Implementasi

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Indikator kekuasaan, kepentingan- terlibat dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNT di Kecamatan Sipatana khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki, menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi program ini menjalankan perannya berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai. Sejalan dengan menurut (Nani et al., 2024) bahwa pengambilan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dibutuhkan peran stakeholder para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan secara menyeluruh, pers (media) serta lembaga swadaya masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan publik.

Karakteristik lembaga yang berkuasa

Karakteristik lembaga yang berkuasa dalam penyaluran dana BPNT di Kecamatan Sipatana khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki memberikan pelayanan dan memperlihatkan pengelolaan yang baik pada masyarakat yang dapat menjunjung tinggi asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan kebijakan yang berpedoman pada aturan resmi serta melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat menjadikan program BPNT di wilayah ini terlaksana secara lebih terbuka dan adil pada masyarakat yang terdampak oleh bantuan ini sehingga dapat berguna dalam melangsungkan atau menjalani kehidupan mereka.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Indikator ini dalam pelaksana BPNT di Kecamatan Sipatana, khususnya di Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tanggikiki, masih terdapat sejumlah kendala yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keluhan dari masyarakat terkait respon yang lambat dari pihak kelurahan ketika terjadi kendala dalam proses pencairan dana, serta kurangnya kegiatan sosialisasi langsung yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan jadwal penyaluran bantuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan implemntasi BPNT di Kecamatan Sipatana berjalan dengan ketentuan berlaku. Dari sembilan indikator yang dianalisis, masih terdapat beberapa aspek yang

belum maksimal, terutama pada indikator derajat perubahan ekonomi, pelaksana program, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana. Aspek seperti responsivitas pelayanan, komunikasi dua arah, serta sistem evaluasi masih perlu diperbaiki agar memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan efisiensi pelayanan agar program BPNT bukan hanya bantuan konsumtif, akan tetapi dapat membentuk kemandirian serta kesejahteraan masyarakat secara berangsur-angsur.

Untuk Pemerintah kecamatan dan kelurahan, disarankan perlu meningkatkan kemampuan aparat pelaksana bantuan BPNT melalui pelatihan dan penerapan standar pelayanan. Mereka harus melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami mekanisme BPNT dan menyediakan saluran informasi yang mudah diakses. Selain itu, pemerintah daerah harus merancang program pendukung seperti pelatihan kewirausahaan dan akses modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, J. (2021). *Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo* (Skripsi). Universitas Negeri Gorontalo.
- Ayu Pratiwi, D. (2022). Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. *PublikA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Linawati, D. (2023). *Analisis kesejahteraan masyarakat setelah berakhirnya Covid-19 pada RT 002 dan 015 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur*.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik* (M. Nizar, Ed.). CV Anugrah Utama Rahaja.
- Nani, Y. N., Tohopi, R., & Tui, F. P. (2024). *Kebijakan publik dalam perspektif pembangunan rumah layak huni*. Tahta Media Grup.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pramesti, M. W. (2021). Dimensi-dimensi strategis administrasi publik dalam Islam. *Politea*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4312>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dalam *Kebijakan publik*. UNISRI Press.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu administrasi dan analisis kebijakan publik: Konseptual dan praktik*.

- Septiriana, W. (2022). *Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Antara harapan dengan kenyataan (Studi pada masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*.
- Tahir, A. (2019). *Kebijakan publik dan good governance*. Academia Education.
- Yani Ristanti, E., & Fadhli, K. (2022). Analisis implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *JPEKBM*, 6(2), 1–7.